

STRATEGI IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA SEREANG)

Vira Safitri¹, Ahmad Mustanir², Barisan³

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: virasafitri002@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan studi kasus di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Program BLT merupakan intervensi sosial pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta belum optimalnya sistem pendataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, aparatur desa, kepala dusun, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi BLT di Desa Sereang bersifat partisipatif dan terstruktur, dengan dukungan komunikasi publik yang transparan, sumber daya manusia yang cukup memadai, serta disposisi pelaksana yang positif. Namun, terdapat hambatan berupa ketidakmutakhiran data sosial, ketergantungan penerima terhadap bantuan, dan kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur desa. Penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas birokrasi desa, digitalisasi sistem pendataan, serta edukasi publik mengenai tujuan BLT sebagai bantuan sementara. Dengan strategi yang lebih inklusif dan responsif, implementasi BLT di tingkat desa diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Strategi Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Sereang*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation strategy of Direct Cash Assistance(BLT) in improving community welfare, with a case study in Sereang Village,Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. The BLT program is a government social intervention aimed at the poor and vulnerable as a form of social protection based on Village Funds. In its implementation, this program still

faces a number of obstacles such as inaccuracy of targets, low community participation insupervision, and not optimal data collection systems. This study uses a descriptivequalitative approach with George C. Edwards III's policy implementation theory,which includes four main indicators: communication, resources, executivedisposition, and bureaucratic structure. Data was collected through in-depthinterviews, observations, and documentation of village heads, village officials,hamlet heads, and communities receiving assistance. The results of the study showthat the BLT implementation strategy in Sereang Village is participatory andstructured, with the support of transparent public communication, adequate humanresources, and a positive implementation disposition. However, there are obstaclesin the form of not updating social data, the dependence of recipients on assistance, and lack of technical training for village officials. This study suggests strengtheningthe capacity of village bureaucracy, digitizing the data collection system, andeducating the public about the purpose of BLT as temporary assistance. With amore inclusive and responsive strategy, the implementation of BLT at the villagelevel is expected to be more effective in improving community welfare in asustainable manner.

Keywords: *Implementation Strategy, Direct Cash Assistance, Community Welfare, Edwards III, Sereang Village*

PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat miskin, khususnya dalam situasi darurat. Di Desa Sereang, penerapan BLT menghadapi sejumlah kendala seperti akurasi data penerima dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menilai efektivitas strategi implementasi program BLT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang mencakup empat indikator utama sebagai dasar analisis.

Bantuan Langsung Tunai adalah penyaluran uang tunai kepada masyarakat yang miskin sebagai reaksi

atas meningkatnya harga BBM agar bisa membantu kalangan masyarakat miskin. Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program kesejahteraan, pemerintah Indonesia memberikan program ini kepada masyarakat miskin. Menurut Edi Suharto (Awalia & Sumayya, 2024), bahwa BLT ini dapat berdampak terhadap masyarakat yang menerima bantuan, dan salah satu dampaknya adalah mampu mendorong pergerakan ekonomi dengan membelanjakan bantuan tersebut. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin dalam bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM. Masyarakat miskin yang dianggap sebagai Rumah Tangga

Sasaran (RTS) harus terkena dampak langsung program BLT-RTS selama pelaksanaannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk secara efektif memantau Rumah Tangga Sasaran yang tentunya akan terbebani oleh kenaikan harga BBM, serta mendorong tanggung jawab sosial bersama (Putri et al., 2024).

Pemerintah memberikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan atau menunjukkan kedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan berupa pemberian bantuan uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan, yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin (Syah et al., 2024). BLT ini pertama kali dilakukan pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009 dan tahun 2013 yang namanya berganti menjadi Bantuan Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu. Walaupun pelaksanaan program ini belum terealisasi dengan baik, tetapi program BLT masih dijadikan pemerintah sebagai upaya membantu dana meringankan beban masyarakat rumah tangga miskin atau rumah tangga sasaran.

Berbagai permasalahan ataupun kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu

diperbaiki, agar tercapainya sebuah keadilan dan diharapkan kepada pemerintah Desa memberikan arahan yang lebih akurat kepada masyarakat agar masyarakat paham akan tujuan dan proses pemberian BLT tersebut (Fatimah & Haris, 2023).

Perubahan kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah dan memastikan bantuan diberikan kepada yang paling membutuhkan, menimbulkan beberapa pertanyaan terkait strateginya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa keluarga yang sebelumnya bergantung pada BLT kini tidak lagi menerima bantuan, meskipun kondisi ekonomi mereka masih rentan. Di sisi lain, penyaluran BLT kepada kelompok masyarakat yang lebih terbatas ini juga membuka ruang untuk mengevaluasi apakah bantuan tersebut dapat benar-benar meningkatkan kualitas hidup penerima dalam jangka panjang.

Melihat dari dampak yang ditimbulkan, kebijakan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat miskin di Sereang. Selain itu, dampak yang ditimbulkan kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan cenderung memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas masyarakat itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi dapat diartikan sebagai rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam situasi yang tidak stabil, manajer berperan aktif dalam merancang strategi. Secara umum, strategi adalah metode atau pendekatan untuk melaksanakan rencana agar mencapai tujuan. Secara spesifik, strategi adalah upaya berkelanjutan organisasi untuk menghadapi masalah dengan memanfaatkan sumber daya secara adaptif. Dalam teori, strategi dimaknai sebagai rencana, kegiatan, instrumen, sistem, dan pola pikir. Secara umum, strategi merupakan metode, pendekatan, atau taktik untuk melaksanakan rencana yang telah disesuaikan dengan targetnya secara tepat guna mencapai tujuan. Secara spesifik, strategi adalah upaya yang dilakukan oleh setiap organisasi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, dilakukan secara adaptif dan penerapannya disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang ada, baik kondisi internal organisasi maupun kondisi eksternalnya. Kesimpulannya, strategi berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan dan sasaran yang ingin dicapai (Syakhirul Alim et al., 2022).

Studi implementasi yaitu krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi kebijakan serta masyarakat

dalam pengaruhnya. Dalam suatu kebijakan tidak pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum bisa di implementasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah disusun secara rinci. Menurut Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Sitorus, 2007).

Menurut Edwards III(Kadji, 2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mengirimkan informasi kepada orang atau komunitas lain. Dalam hal ini, proses pemerintah dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan untuk mencapai hal tersebut kepada publik. Sosialisasi ini penting karena memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan penerima manfaat ini mengetahui kriteria untuk mendapatkan bantuan tunai langsung dari dana desa. b) Sumber daya sebagai

faktor implementasi juga memegang peranan atau posisi yang sangat penting untuk implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan staf dengan kapasitas dan kualifikasi yang sesuai dengan skala yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pengelolanya tenaga ahli yang mumpuni untuk menjalankan fungsi Pemerintah. c) Disposisi(Sikap dari Pelaksana Kebijakan), dalam proses implementasi kebijakan, tidak boleh ada jarak antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan harus ada hubungan yang mendukung antara keduanya untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pengaturan adalah keinginan atau kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan kebijakan yang efektif, implementasi ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan kebijakan. d) Struktur birokrasi mengacu pada kecukupan birokrasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan publik. Struktur birokrasi merupakan elemen penting dari implementasi kebijakan, dan jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik, kebijakan yang iterapkan tidak akan berjalan dengan baik atau mencapai efektivitas yang optimal. Birokrasi merupakan bentuk kelancaran koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan kegiatan, mulai dari pengambil keputusan hingga pelaksana (Pratiwi & Sukmana, 2022).

Teori implementasi kebijakan dari Edwards III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. BLT sebagai intervensi sosial juga perlu ditinjau dari aspek kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan nilai-nilai normatif dalam UUD 1945. Berbagai studi terdahulu menggarisbawahi pentingnya kejelasan komunikasi dan pendataan yang akurat dalam pelaksanaan BLT (Sitorus, 2007).

BLT adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan strategi untuk mengurangi dampak ekonomi dari situasi darurat. BLT diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Instruksi Menteri Desa (Nurdiansah & Permatasari, 2025). Tujuan BLT adalah membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, mencegah penurunan taraf kesejahteraan, dan meningkatkan tanggung jawab sosial. Karakteristik BLT meliputi tujuan kemanusiaan, fleksibilitas penggunaan, distribusi langsung, serta efisiensi dan kecepatan dalam administrasi. Meskipun demikian, implementasi BLT menghadapi tantangan seperti ketidakakuratan data penerima, keterbatasan infrastruktur, dan konflik kepentingan. Bantuan langsung tunai

adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis bantuan bersyarat atau tanpa syarat kepada masyarakat miskin. Denganadanya program ini banyak menuai pertanyaan dan masyarakat desa meragukan strategi implementasi BLT Dana Desa seperti masyarakat merasa kecewa dengan penyaluran BLT yang tidak tepat merata dan tidak sesuai sasaran.

Penelitian ini bertujuan mengisi "gap" atau kesenjangan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji pemahaman masyarakat terhadap kriteria penerima BLT dan belum merancang strategi untuk mengatasi kesalahpahaman serta meningkatkan transparansi. Penelitian ini berfokus pada strategi implementasi BLT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sereang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam perbaikan praktik di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dan untuk kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasilnya lebih kepada makna daripada generalisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi

partisipatif, dan dokumentasi (Haryono, 2023). Informan dipilih secara purposive, terdiri atas kepala desa, aparatur desa, kepala dusun, dan penerima bantuan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumberdata dengan pertimbangan tertentu (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2019). Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu dataprimer dan sekunder. a) Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasilangket, hasil tes, dan sebagainya.b) Data Sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguatan dari data primer (Dr. Abdul

Fattah Nasution, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, kepala dusun dan masyarakat setempat, diperoleh sejumlah temuan yang menggambarkan secara nyata bagaimana Strategi Implementasi Bantuan Langsung Tunai dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sereang). Data hasil wawancara ini telah dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan pentingnya pemaknaan terhadap data yang dikumpulkan secara interaktif dan berkelanjutan.

1. Strategi Implementasi

Implementasi BLT di Desa Sereang menunjukkan bahwa program ini telah terlaksana sesuai dengan prosedur administratif, namun efektivitasnya masih terbatas. Berdasarkan teori George Edward III, hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi:

Informasi mengenai BLT disampaikan melalui musyawarah desa dan surat edaran. Namun, sebagian masyarakat masih belum memahami kriteria penerima, yang menyebabkan munculnya

kecemburuan sosial dan ketidakpuasan.

Salah satu faktor penting dalam teori implementasi kebijakan George Edward III adalah komunikasi, yaitu sejauh mana informasi kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sereang, komunikasi terbukti menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat penerima. Kepala Desa Sereang, Andi Surya Praja Hadiningrat menyampaikan :

"Informasi terkait BLT, baik tentang jumlah alokasi maupun kriteria penerima, disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui forum resmi yang melibatkan aparat desa, BPD, RT/RW, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini kami anggap paling efektif karena membangun transparansi dan menghindari kesalahpahaman di lapangan."

Pernyataan ini mencerminkan adanya komunikasi yang memenuhi tiga unsur penting menurut George Edward III: transmisi pesan yang jelas, kejelasan

informasi, dan konsistensi penyampaian. Dengan menyampaikan informasi secara langsung dalam forum terbuka, pemerintah desa tidak hanya menjalankan sosialisasi formal, tetapi juga membangun ruang diskusi yang memungkinkan klarifikasi langsung oleh masyarakat.

b. Sumber Daya:

Dalam konteks implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sereang, peran sumber daya menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas pelaksanaan program

Pernyataan Ani Selaku Aparat Desa :

“Jumlah petugas, termasuk tim relawan desa, BPD, RT/RW, dan aparat desa, dinilai cukup untuk melaksanakan penyaluran BLT secara tertib.” Selain itu, ia menambahkan bahwa *“penyaluran dilakukan di kantor desa dengan pengawasan langsung,”* yang menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan dan keterlibatan lintas unsur desa dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut secara langsung mencerminkan indikator sumber daya sebagaimana diuraikan oleh

George C. Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil sangat tergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk manusia, anggaran, fasilitas, maupun informasi. Dalam hal ini, ketersediaan tenaga pelaksana dan kesiapan sarana penyaluran menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan program BLT.

Namun, Ani juga menyampaikan bahwa meskipun koordinasi dan arahan dari pihak terkait tersedia, pelaksanaan masih bergantung pada pengalaman lapangan. Ia menyebutkan bahwa:

“Arahan memang ada, terutama dari dinas sosial maupun pendamping desa, meskipun tidak dalam bentuk pelatihan formal yang terstruktur.”

Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara jumlah personel yang cukup dan kualitas teknis yang belum sepenuhnya optimal. Dengan kata lain, ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kapasitas atau kompetensi yang terencana dan berkelanjutan.

c. Disposisi:

Disposisi sebagai indikator penting dalam implementasi kebijakan menurut teori George Edward III mencakup sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Pernyataan bapak Susanto Selaku Kepala Dusun :

“Saya memantau distribusi BLT secara serius dan berkelanjutan. Tidak hanya hadir saat pencairan, saya juga aktif memastikan bahwa warga memahami penggunaan bantuan, terutama agar dana tersebut digunakan secara bijak.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat dusun tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga menunjukkan inisiatif dan kepedulian sosial, yang merupakan manifestasi nyata dari disposisi yang baik. Kepala Dusun bahkan menyampaikan pentingnya edukasi terhadap warga mengenai penggunaan bantuan agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi bisa diarahkan ke pemanfaatan yang lebih produktif. Disposisi yang ditunjukkan oleh Susanto

mempertegas bahwa keberhasilan implementasi BLT tidak semata-mata bergantung pada kepala desa atau struktur formal pemerintahan desa, melainkan juga pada pelaksana teknis di lapangan yang bekerja langsung dengan masyarakat. Sikap tanggap, partisipatif, dan bertanggung jawab seperti ini memperkecil risiko penyalahgunaan bantuan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

d. Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang menekankan perlunya mekanisme prosedural dan koordinatif yang mampu menunjang pelaksanaan kebijakan secara efisien dan terorganisir. Dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sereang, struktur birokrasi tidak hanya ditunjukkan oleh tatanan formal antarlembaga, tetapi juga tercermin dari pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pernyataan Hasnani Rusli Selaku Warga Penerima BLT :
“Saya pribadi tidak melakukan

pendaftaran mandiri, namun saya didata langsung oleh petugas desa. Setelah itu, data diverifikasi dan diumumkan secara terbuka. Pendekatan ini memberi kesan bahwa prosesnya terstruktur dan tidak mempersulit warga yang memang membutuhkan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada telah mampu mengatur mekanisme pelayanan publik secara proaktif, yakni dengan sistem pendataan berbasis jemput bola dan keterbukaan informasi publik. Hal ini mencerminkan bahwa struktur birokrasi di tingkat desa tidak hanya bekerja ke dalam (internal), tetapi juga keluar (eksternal), yaitu menjangkau dan mengayomi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam teori implementasi Edward III, struktur birokrasi yang ideal mencakup adanya kejelasan prosedur, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta sistem dokumentasi yang tertib. Pengalaman Hasnani memperlihatkan bahwa jalur informasi dan alur kerja di Desa Sereang telah dibangun dengan baik, memungkinkan warga memahami dan mengikuti prosedur BLT tanpa hambatan berarti. Penempatan

informasi di kantor desa serta penggunaan hasil Musyawarah Desa (Musdes) sebagai acuan penetapan daftar penerima memperkuat akuntabilitas birokrasi lokal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan

implementasi kebijakan publik, termasuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), tidak hanya bergantung pada desain kebijakannya, tetapi juga pada keberadaan faktor pendukung di lapangan. Menurut Edward III (1980), faktor pendukung seperti komitmen pelaksana, dukungan masyarakat, serta ketersediaan data yang akurat, berperan penting dalam menjembatani antara perencanaan dan realisasi kebijakan secara efektif. Hasil wawancara dengan Ani, seorang aparat desa di Desa Sereang, menguatkan bahwa faktor pendukung di desa tersebut tergolong kuat:

“Pelaksanaan BLT di Desa Sereang didukung oleh beberapa faktor utama Koordinasi lintas lembaga desa seperti BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat sangat aktif sejak tahap pendataan hingga pengawasan distribusi. Data penerima juga relatif akurat,

sehingga penyalurannya tepat sasaran. Penyaluran yang tertib dan tepat waktu menunjukkan adanya komitmen teknis dan administratif dari aparatur desa."

Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari aparatur desa dalam menjalankan tugas administratif secara tertib, serta koordinasi kelembagaan yang harmonis sebagai bentuk dukungan struktural. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang akurat menjadi pondasi penting dalam menekan risiko kesalahan sasaran penerima bantuan.

b. Faktor Penghambat

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, terdapat empat faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta kesalahan pendataan merupakan bagian dari masalah sumber daya dan struktur yang dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan,

termasuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ani, salah satu aparatur desa di Desa Sereang, dijelaskan bahwa:

"Secara umum, hambatan yang dihadapi tidak bersifat masif, namun tetap signifikan dalam aspek administratif. Salah satu kendala yang disebutkan adalah keterlambatan dalam menyelesaikan pertanggungjawaban atau kelengkapan syarat-syarat administratif dari dinas terkait untuk pencairan dana. Meskipun tidak mengganggu secara langsung penerimaan masyarakat, keterlambatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas birokrasi desa dalam mengelola beban administratif program bantuan sosial."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi di tingkat desa dapat memperlambat proses pencairan BLT. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya efisien dalam menyerap dan mengelola alokasi anggaran yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak

pada distribusi bantuan ke masyarakat. Lebih jauh, kendala dalam pendataan juga menjadi sorotan. Pendataan yang tidak mutakhir atau tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kecemburuhan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan. Menurut Edward III, struktur organisasi dan sumber daya yang tidak memadai akan melemahkan efektivitas kebijakan karena pelaksana tidak memiliki alat yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan optimal.

KESIMPULAN

Strategi implementasi BLT di Desa Sereang menunjukkan karakteristik partisipatif dan terstruktur, namun efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa kendala teknis dan administratif. Ke depan, perlu ada digitalisasi sistem data penerima, peningkatan kapasitas aparat, dan kampanye edukasi untuk menegaskan sifat sementara dari bantuan. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan teknokratik dan partisipatif dalam implementasi kebijakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.

Edward III, G. C. (1980). Implementing

- Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.
- Awalia, S., & Sumayya, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 11(2), 156–175.
- Fatimah, S., & Haris, S. (2023). Implementation of Government Policy in the Distribution of BLT (Cash Trans. *Jurnal Polisci*, 1(2), 76–83.
<https://doi.org/10.62885/polisci.v1i2.94>
- Nurdiansah, T., & Permatasari, A. (2025). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Desa Karang Agung, Tanjung Palas Utara, Bulungan, Kalimantan Utara *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu* ..., 12, 1–12.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/15168>
- Putri, R. A., Munawar, M. F., & ... (2024). 10 Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Situwangi. ... *Uin Sunan Gunung* ..., 4(8).
- <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/2732>
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/2732/1892>

- Sitorus, M. (2007). Pengaruh Communication, Disposition, dan Bureaucratic Structure Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1), 59–81. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/412%0Ahttp://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/412/384>
- Syah, A. Z., Sachmaso, H. H., Fadillah, F. P., & ... (2024). Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin di Indonesia. *Media Hukum* ..., 2(3), 274–280. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/475%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/475/509>
- Panjaitan, M. et al. (2024). Implementasi Program BLT di Masa Pandemi.
- Pratama, A. et al. (2024). Evaluasi Strategi Implementasi BLT Dana Desa.
- Saprudin & Harahap. (2022). Implementasi Program BLT di Desa Banyu Tajun.
- Triswanto, A., & Setiawati, R. (2024). Evaluasi Sumber Daya Program BLT Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wahyudiat, D. (2018). Kinerja Pemerintah Desa dalam Program BLT.